



# **POLITICAL AWARENESS OF SANTRI PONDOK PESANTREN AL IKHSAN PURWOKERTO AS BEGINNER VOTER** **(Case Study of Political Communication Toward Local Election 2018 Banyumas Regency at Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji – Purwokerto)**

**Muhammad Sulthan**

FISIP Universitas Jenderal Soedirman

Email : sultatangmaning@gmail.com

## **Abstract**

*The title of this research is "Political Awareness of Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan Purwokerto as Beginner Voter, Case Study of Political Communication Toward Local Election 2018 Banyumas Regency at Pondok Pesantren Ikhsan Beji – Purwokerto. Aim of this research is to explain and understand the political awareness beginner voter santri pondok pesantren Al Ikhsan. Methodology that being used is qualitative method, with descriptive approach and research design of study case. Technique to choose informant using purposive sampling. Research data being got from deeper interview, observation, and documentation. The result shows that political literacy of santri pondok pesantren Al Ikhsan is very good. It relates with school circumstances, surrounding, pondok pesantren circumstances, and from the organizer of pesantren. Information access that being received exclude their peer group or their surroundings, especially from social media usage include internet.*

**Keywords:** political literacy, voters.

## **PENDAHULUAN**

Tidak lama lagi pilkada serentak Kab. Banyumas akan dilaksanakan pada tahun 2018, tepatnya 14 April 2018 karena akhir masa jabatan Bupati Banyumas pada 14 April 2018, maka pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banyumas dilaksanakan Juni 2018 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah," menurut penyampaian Unggul Warsiadi selaku Ketua KPU Kabupaten Banyumas, kurang lebih masih satu tahun setengah lagi.

Diperlukan kerja keras oleh KPU Prop. Jawa Tengah dan KPU Kab. Banyumas untuk menyosialisasikan pilkada tersebut agar partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah dalam mengikuti pilkada tetap tinggi. Bagi pemilih yang sudah pernah memilih sudah tidak masalah lagi tetapi bagi pemilih pemula perlu penguatan komunikasi yang lebih intensif agar mau ikut berpartisipasi dalam pilkada kabupaten dan propinsi.

Pemilih pemula memiliki posisi yang cukup berarti di antar partai politik dan calon politik dalam pilkada untuk menarik mereka sehingga mereka mengambil



keputusan untuk memberikan suaranya pada partai politik tertentu. Dengan demikian golongan putih (golput) dapat diminimalisir.

Meningkatnya angka golput pada setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia bisa disebabkan oleh banyak factor, diantaranya sosialisasi politik dan pendidikan politik khususnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Data KPU, tingkat golput pada gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara. Angka golput Pilpres 2014 lebih parah dibanding Pilpres 2009 yang mencapai 27,7%. Bahkan lebih buruk dibanding Pilpres 2004 (yang hanya mencapai 24%) (<http://www.harianterbit.com/2015/read/2014/07/23/5622/26/26/> di akses pada tanggal 8 Feb 2017). Sementara angka golput di Jawa Tengah mencapai 49 persen termasuk cukup tinggi, hasil quick count JSI di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang, Minggu (<http://www.solopos.com/2013/05/26/pilgub-jawa-tengah-angka-golput-pilgub-capai-49-persen-410301> di akses 8 Feb 2017). Dan Jumlah Jumlah ketidakhadiran atau angka golongan putih (golput) dalam Pilkada Banyumas 2013 mencapai 44.341 suara atau 33,7 %. Angka tersebut diperoleh dari DPT 1.315.267 dikurangi jumlah partisipasi 871.926 suara (**suaramerdeka.com** di akses 8 Feb 2017).

Oleh karena itu, sosialisasi politik perlu di optimalkan terutama kepada pemilih pemula sangat perlu diberika pendidikan politik karena mereka baru pertama kali mengikuti pemilu atau pilkada. Data KPU Jawa Tengah Jumlah pemilih pemula pada pada tahun 2015 sebanyak , 149.464 (Laki-lai); 147.603 (Perempuan), 297.067 (1,91) (<https://data.kpu.go.id/dps2015> di akses pada tanggal 8 Feb 2017). Jumlah pemilih baru dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kab. Banyumas Jawa Tengah untuk Pemilihan Umum Presiden (pilpres), pada bulan Juli 8.025 pemilih "Dari catatan KPU ada 8.025 pemilih pemula yang tanggal 8 Juli nanti berusia 17 tahun," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Banyumas, Aan Rohaeni, (<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2009/05/11/89365/j> di akses 8 Feb 2017).

Pendidikan politik pada dasarnya adalah melakukan atau memberikan pemahaman, pengetahuan, pembentukan sikap dan perilaku agar tentang politik, pemilu, dan pilkada untuk agar ikut bertanggung jawab tentang pemilu, pilkada, pilpres dalam bentuk memberikan atau menyalurkan hak suaranya.

Yayasan pondok pesanteren Al Ikhsan sebuah institusi pendidikan di dalamnya terdapat pemilih pemula yaitu para santri yang berpendidikan formal Madrasah Aliyah dan mahasiswa/mahasiswa yang ikut mondok di pesantren tersebut yang juga sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang belum pernah memilih atau pemilih yang belum pernah menggunakan hak pilihnya yang memenuhi syarat untuk memilih dan berumur 17 – 21 tahun atau pemilih belum yang belum berumur 17 tahun tetapi telah menikah.

Pemilih pemula dan literacy politik (melek politik) di kalangan santri merupakan aspek yang penting untuk diteliti lebih lanjut dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pilkada, menjelang pilkada serentak 2018 di Banyumas. Literacy politik santri jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti kemelekan politik santri. Jadi literacy politik santri adalah tingkat pengetahuan, pemahaman politik santri. Dalam hal ini politik di artikan secara spesifik adalah pemilu atau pilkada.



## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Apa dan bagaimanakah melek politik santri Al Ikhsan menjelang Pilkada serentak 2018.

## KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Melek Politik (*literacy*politik),

Istilah *melek* sehari-hari diartikan “melihat” dengan melihat, kita akan tahu apa yang dilihat atau terlihat. Jika tahu dengan yang dilihat, maka kita akan tahu bagaimana mesti bertindak atau bersikap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:896), melek artinya tidak tidur atau terjaga. Sedangkan melek politik diartikan mengetahui tentang politik (pilkada) arti dan fungsi politik (pilkada) ([www.kpu.bengkayan.or.id](http://www.kpu.bengkayan.or.id)).

Literasi politik secara singkat didefinisikan oleh Krosnick yang dikutip oleh Sabiq (dalam jurnal [kpu.banjarnegara.or.id](http://kpu.banjarnegara.or.id)), sebagai “the state of having political information”,<sup>9</sup> suatu keadaan dimana seseorang memiliki informasi politik. Kepemilikan atas informasi politik ini akan sangat menentukan perilaku memilih mereka. Yudi Latif dengan mengutip pendapat Martel (1983) menyatakan bahwa publik yang *well-informed* (mendapat akses informasi secara luas) akan lebih menekankan aspek-aspek substansi yang diusung oleh kandidat, sebaliknya publik yang *less informed* (kurang mendapat akses informasi) akan lebih menekankan aspek-aspek personalitas. Sementara Alwasilah berpendapat bahwa literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. (2012;197).

Secara umum definisi melek politik penekanan pada tingkat pemahaman atau tingkat pengetahuan politik. Dengan demikian pendapat Zaller lebih mendekati pendapat sebagian besar pendapat para ahli. Menurut Zeller (1992) mendefinisikan melek politik sebagai pemahaman individu mengenai peristiwa politik dan kesadaran politik mereka. Maka secara dapat dikatakan jika seseorang melek politik berarti ikut berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam penelitian ini santri ikut memberikan hak suaranya setiap pemilu, pilpres, pilkada, atau bahkan pilkades.

Maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa melek politik adalah suatu sikap dan perilaku sadar dalam dirinya tentang politik/pilkada dan berpartisipasi dalam pilkada tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian kata melek politik penekannyanya pada pemahaman atau pengetahuan tentang proses politik, jadi istilah politik digunakan secara bergantian dengan pilkada, disesuaikan dengan penelitian ini.

### Pengertian Pemilih Pemula

Menurut Pahmi pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (2010;54). Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun.





Dalam komunitas santri, terdapat masyarakat pemilih pemula yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, dan atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak suara dan untuk bisa menggunakan hak tersebut maka warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 16 ayat 1. Santri yang dikategorikan sebagai pemilih pemula yaitu santri yang baru pertama kali mengikuti kegiatan pemilihan umum. Dengan demikian, referensi pengalaman politik yang dimiliki masih rendah. Tingkat pengalaman politik santri sebagai pemilih pemula ini masih rendah apabila dibandingkan dengan pemilih secara umum, sehingga seringkali menimbulkan apatisme atau acuh tak acuh terhadap proses politik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya orientasi politik dalam diri santri.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih ngambang pilihan politiknya (*swing voters*) labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

Terlaksananya kegiatan Pilkada yang efektif tidak terlepas dari peran dan partisipasi warga dalam berkontribusi demi terwujudnya pelaksanaan Pilkada. Partisipasi warga dalam pelaksanaan Pilkada tidak hanya dapat dipahami sebatas bagaimana warga yang notabene sebagai pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara semata, tetapi lebih jauh bahwa bagaimana pemilih benar-benar dapat memahami bahwa Pemilu merupakan suatu hak dan kewajiban bagi warga negara untuk memberikan aspirasinya secara politik yang dilindungi oleh negara. Untuk bisa mewujudkan cita-cita ini, pemilu mesti didukung dengan kesadaran politik dari warga negara. Tanpa didukung dengan warga Negara yang melek politik, rasanya tujuan ataupun cita-cita pemilu akan menjadi sia-sia. Dalam kaitannya dengan politik praktis ini, peran dan partisipasi warga sangat diharapkan agar terwujudnya nilai-nilai demokrasi. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemberian suara merupakan wujud nyata dari partisipasi warga dalam Pemilu. Hal ini tentunya akan membuktikan bahwa warga negara telah *melek politik*.

## **METODE PENELITIAN**

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah kualitatif, pendekatan deskriptif dan desain penelitian studi kasus. teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Metodologi tersebut memberikan pemahaman penelitian berupa paparan dan deskripsi apa dan bagaimana melek politik santri pondok pesanteren Al Ikhsan. Data. Teknik pengumpulan data melalui indepth interview, observasi dan dokumentasi dengan santri pondok pesantren Al Ikhsan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu di atas, terdapat juga



penyelenggara pemilu yang bersifat sementara, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/ kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Dan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten dilaksanakan oleh KPU ditingkat kabupaten/kota.

Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Semua informan ternyata sudah mengetahui apa itu pemilu dan pilkada, menurut Muhibbudin Waly (17 tahun); “pemilu itu meliputi pilpres, pileg, dan pilkada. Pilkada Gubernur, dan pilkada Bupati tahun depan kan” Hal sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Krosnick sebagai *“the state of having political information”*,<sup>9</sup> suatu keadaan dimana seseorang memiliki informasi politik. Para santri ini telah memiliki informasi politik dalam hal ini informasi pilkada. Menurut informan As’ad Imam M, “saya dapat informasi tentang politik dari teman melalui media social kemudian dari TV, kalau dari Koran sangat jarang kan harus beli, mending pulsa dari pada beli Koran”.

Pernyataan informan As’ad Imam M di atas, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Afan Gaffar (2002: 102) sendiri misalnya menyebutkan beberapa agen atau media dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio. Gabriel A. Almond (dalam Mochtar Mas’oed & Colim Mac Andrews, 2001: 37-40) menyebutkan beberapa agen dalam melakukan sosialisasi politik yaitu, (1) keluarga, (2) sekolah, (3) kelompok bergaul, (4) pekerjaan, (5) media massa, dan (6) kontak-kontak politik langsung. Sementara peran KPU sebagai agen dalam pendidikan politik untuk memilih pemula santri pondok Al Ikhsan tidak disebutkan. “KPU Banyumas tidak pernah datang sosialisasi disini” demikian pernyataan Syukron Ibnu Rofik yang juga informan.

Masih banyaknya pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya pada beberapa pilkada demikian juga suara yang tidak sah. Hal ini tentu berdampak pada seberapa tinggi tingkat melek politik warga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. “Insya Allah pilkada tahun 2018 nanti kami akan memilih apalagi kami tidak dipersulit cukup memperlihatkan KTP sudah diizinkan” Demikian yang ungkapkan oleh Zakaria Al Anshori.

Sebagai pemilih pemula tahun 2018 nanti, begitu pentingkah pilkada Banyumas nanti ? “pilkada itu penting, untuk memilih bupati baru pemimpin kita, atau memilih bupati yang lama lagi” menurut Rudi Itmamul Wapa,. ditanyakan lagi, apakah akan ikut memilih pilkada nanti? “ Insya Allah, iya”



Berdasarkan data KPU tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 64,23 persen, atau lebih rendah dari target KPU sekitar 75,5 persen. Sementara jumlah golput Jawa Tengah 49% (<http://www.solopos.com>). Dan data KPU Banyumas Jumlah ketidakhadiran atau golongan putih (golput) dalam Pilkada Banyumas 2013 mencapai 44.341 suara atau 33,7 %. Angka tersebut diperoleh dari DPT 1.315.267 dikurangi jumlah partisipasi 871.926 suara. (<http://www.suaramerdeka.com/>) di akses 9 January 2017 hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan, ini diungkapkan sendiri oleh Unggul Warsiadi selaku Ketua KPU Kabupaten Banyumas ([www.kpu.banyumas.go.id](http://www.kpu.banyumas.go.id) diakses 9 januari 2017) pernyataan ini serupa yang diungkapkan oleh informan Syukron Ibnu Rofik.

Tingginya golput pada tiap pilkada terdapat di dalamnya adalah pemilih pemula yang masih tidak melek politik menyebabkan acuh tak acuh untuk ikut berpartisipasi atau sudah melek tetapi malas saja untuk mengunjungi TPS bisa juga pemilih merasa bosan mengikuti pemilihan dari pemilihan Presiden sampai ke Pilkadaes yang tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada dirinya.

Keberadaan pemilih pemula menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada karena merupakan massa potensial dalam mendukung partai politik dan calon-calon pemilu dan pilkada. Ada banyak tulisan yang mengatakan pemilih pemula memiliki posisi yang penting dalam pemilu dan pilkada dikarenakan jumlahnya setengah bagian dari jumlah keseluruhan pemungut suara. Pemilih pemula sering dideskripsikan sebagai pemilih yang ngambang, belum jelas pilihannya sehingga mudah dipengaruhi. Karena posisinya demikian itu sehingga menjadi sasaran politik.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemilih pemula memerlukan goodwill yang kuat, karena apabila pemilih pemula tidak mempunyai goodwill politik yang kuat maka menyebabkan rendahnya kualitas politik pemilih pemula, implikasinya pada rendahnya kualitas pemilu sehingga diperlukan sosialisasi politik sepenuh hati oleh KPU dan *stakeholder* lainnya, KPU jangan terbang pilih dalam memberikan sosialisasinya politik, hanya tempat tertentu saja atau sekolah-sekolah tertentu saja. Terbukti pondok pesantren Al Ikhsan tak pernah sekalipun diberikan sosialisasi politik oleh petugas KPU Banyumas. Kualitas pilkada sangat dipengaruhi oleh bagaimana seluruh tahapan pilkada serentak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa kualitas melek politik santri Al Ikhsan cukup bagus bahkan sangat bagus, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan seluruh informan telah mengetahui, memahami, mengerti, dan menyanya dari tentang pilkada serentak 2018 nanti di Banyumas. Mereka menyadari pilkada 2018 nanti karena akan menggunakan hak pilihnya.

Kualitas melek politik yang sangat bagus bagi pemilih pemula santri pondok pesantren Al Ikhsan berkat akses informasi dari teman sekolah, teman pondok, dari





pengurus pondok serta melalui media media social. Tidak sama dengan pondok pesanteren yang lain Kyai akan mengarahkan dan bahkan (menentukan pilihan anak didik santrinya, tetapi di pondok ini Kyai sama sekali tidak terlibat dan tidak mengarahkan apalagi turut menentukan pilihan politik anak didik santrinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah Chaidar Alwasilah. (2012). *Pokoknya Rekayasa Literasi*. Kiblat Buku Utama. Bandung.
- Azwar, Saifuddin. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Carol A. Cassel dan Celia C. Lo (1997) , "Theories of Political Literacy," *Political Behaviour*
- Cassel, Carol A. dan Celia C. Lo (1997). "Theories of Political Literacy," *Political Behaviour*
- Chang Yan, Margaret .(1993). "Study of Political Literacy of Women Group Members in Community Development Service in Hong Kong". Disertasi PhD, University of Hong Kong,
- Fatah, Eep Saefullah (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kus, Zafer . "Political Literacy Status of Pre-Service Social Studies Teacher". *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 177 (2015): 197-202.
- Lupiyanto, Ribut (2014). *Mendidik Publik Melek Politik*. Gorontalo Post, Edisi 20 Maret
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja
- Rosdakarya, 2007. Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- Rumah Pemilu. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014 di Indonesia." Diakses 30 Mei 2015. <http://www.rumahpemilu.org/in/read/3366/Brief-Overview-of-the-2014-Elections-in-Indonesia.html>
- Subekti, Tia. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MagetanI Tahun 2013*, skripsi. Malang: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 2014
- Yudi Latif, "Debat Capres, Bukan Basa-basi," *Kompas*, 28 Juni 2004
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. [www.kpu.co.id](http://www.kpu.co.id). Di akses pada tanggal 9 Januari 2017. [www.sumenep.go.id](http://www.sumenep.go.id). Di akses 9 Januari 2017. <http://politik.news.viva.co.id/news/read/383568-jumlah-kursi-dprd-di-pemilu-2014-bertambah>, diakses pada tanggal 28 September 2015.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sumenep](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep). di akses pada Tanggal 9 Januari 2017.
- Jurnal Penelitian Politik | Volume 12 No. 1 Juni 2015 | 117-135.